

# PEMBANGUNAN YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT INDONESIA: SEBUAH KAJIAN KONSEP

## *DEVELOPMENT FOR SOCIETAL WELFARE: A CONCEPTUAL STUDY*

**M. Syawie**

Puslitbangkesos, Kementerian Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur  
E-mail: msyawie@yahoo.com

Diterima: 10 Oktober 2014; Direvisi: 30 November 2014; Disetujui terbit: 30 Desember 2014.

### **Abstract**

*Article improving the welfare of this community, will review the construction of the meaning of the concept which states that development can not be considered successful when poverty, and inequality worse. In other words, the construction accommodates the importance of human dignity and welfare of the public as the ultimate goal of development. This article reviews the literature study methods. From The review revealed information that The concept of development has a relationship with concept kesejahteraan country characteristics, namely the country's commitment in creating employment opportunities, sosial security asuransi, the implementation of quality and affordable education.*

**Keywords:** *development, social welfare, poverty.*

### **Abstrak**

Artikel pembangunan yang menyejahterakan masyarakat ini, mengulas perihal makna pembangunan yang menyebutkan bahwa pembangunan belum bisa dikatakan berhasil bila kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan menjadi lebih buruk. Dengan perkataan lain, pembangunan mengakomodasi pentingnya martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat luas sebagai tujuan pokok pembangunan. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Berdasarkan kajian literatur terungkap bahwa makna konsep pembangunandapat mengurangi kemiskinan,menekan ketimpangan dan mengurangi pengangguran boleh dikatakan memiliki hubungan dengan negara kesejahteraan. Negara dikatakan masyarakatnya akan sejahtera bila memenuhi empat kriteria pokok yaitu: komitmen negara dalam dalam menciptakan lapangan pekerjaan, adanaya jaminan asuransi sosial dan pendidikan yang berkualitas, dan kebijakan sosial sebagai upaya retribusi kekayaan.

**Kata kunci:** *pembangunan, kesejahteraan sosial, kemiskinan.*

## **PENDAHULUAN**

Pendapatan rata-rata 10 persen orang kaya kini sembilan kali lebih banyak daripada 10 persen orang miskin. Salah satu penyebabnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Stiglitz (2014) mengungkapkan kesenjangan bisa berbalik ke kesetaraan ketika pemerintah berperan. Dia memberi contoh Brazil sebagai negara yang berhasil menekan kesenjangan. Brazil mengutamakan manajemen kebijakan yang kuat dan fokus. Mulai dari kebijakan kuat di bidang pendidikan yang dianggap vital

sampai kebijakan untuk fokus mengurangi kemiskinan dengan memberi bantuan langsung yang tepat sasaran dan tepat guna. Presiden Strategi Pembangunan Korea Seung Hunchun, dalam seminar internasional bertajuk *Growth Strategy for A Rising Indonesia* di Badung, Bali (Kompas, 2014), berpendapat bahwa konsistensi kebijakan pembangunan menjadi prasyarat untuk mencapai level negara maju. Menjadi persoalan, konsistensi itu rentan buyar karena terlalu banyak kepentingan politik jangka pendek yang tak mau tunduk pada kepentingan nasional jangka

menengah-panjang. Menurutnya pengalaman keberhasilan Korea mencapai level negara maju sekaligus rekomendasi bagi Indonesia. Guna mengimplementasikannya diperlukan keberanian dan determinasi presiden, kesabaran dan pengorbanan masyarakat, serta kesepahaman semua pemangku kepentingan untuk meletakkan cita-cita bersama di atas kepentingan jangka pendek setiap kelompok, termasuk partai politik. Bagi Indonesia, Chun berpendapat, kinilah saat tepat untuk menyusun visi pembangunan yang sesuai dengan momentum yang ada. Sekarang adalah waktu yang krusial bagi Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia bisa dengan mudah jatuh. Namun, jika bisa menjalankan kebijakan dengan tepat, hasilnya akan luar biasa. Bahkan, jika berhasil, hal itu tak bisa dibandingkan dengan keberhasilan negara-negara lain.

Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Perekonomian dalam pidato peluncuran buku *Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru* (Kompas, 2014), mengatakan bangsa Indonesia terlalu besar, terlalu majemuk, dan terlalu kompleks kalau hanya dibangun oleh satu kelompok. Dengan demikian, perlu kerja sama semua pihak untuk menjadi keniscayaan. Zamannya sekarang, perlu ada kerja sama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah tidak mungkin jalan sendiri tanpa dukungan legislatif dan yudikatif. Fragmentasinya sekarang sudah tidak masuk akal. Pembangunan, menurut Chairul, harus dilakukan secara bersama-sama. Kini saatnya semua komponen bangsa bergotong royong di bawah pimpinan yang kuat, efektif, dan mengerti apa yang harus dilakukan.

Dekade 1970-an menjadi era paling bergairah dalam sejarah perkembangan konsep pembangunan di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pada dekade ini, Dudley Seers,

sebagaimana dikutip Chaniago (2012), patut kita tempakan sebagai orang terhormat dalam sejarah pemikiran tentang pembangunan. Menyusul pemikiran yang ditulisnya pada tahun 1969, karaya-karya Seer berikutnya mempertegas definisinya yang didukung banyak orang tentang arti pembangunan yang memberi perhatian serius pada masalah kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Dudley Seers adalah ahli ekonomi negara maju pertama yang meletakkan pembangunan manusia dan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.

Tujuan paling penting bagi semua pemerintahan adalah melakukan pembangunan. Bahkan, satu agenda pokok dunia adalah menentukan tujuan pembangunannya. Merancang pembangunan pada masa depan tak hanya perkara global, tetapi justru ada di jantung persoalan nasional. Ada dua butir refleksi di sini: pemahaman kita akan pembangunan dan problematikanya serta cara kita merencanakan pembangunan dan implikasinya. Satu persoalan besar pembangunan dunia adalah kemiskinan. *UNDP* (2014) melaporkan, lebih dari 5 miliar orang masih hidup di bawah 1,25 dollar AS per hari. Tak hanya itu, setiap hari 22.000 anak-anak meninggal karena kemiskinan (*UNICEF*, 2013), 27-28 persen anak di negara berkembang tinggi badannya tak sebanding dengan beratnya (*WHO*, 2014), dan 72 juta anak tidak pernah sekolah, dan satu miliar orang masih buta huruf (*UNESCO*, 2013). Selain itu, 40 juta orang terinfeksi *HIV/AIDS*, satu miliar orang tak bisa mendapat air bersih, dan 2,6 miliar tidak bisa menikmati sarana sanitasi dasar (Nugroho, 2014).

Pada Oktober 2015, target waktu pencapaian delapan poin Tujuan Pembangunan Milenium (*MDGs*) akan berakhir. Kini, segala sesuatu harus dilakukan dengan segera dan cepat dalam kaitan dengan pemberantasan kemiskinan dan

kelaparan, akses terhadap pendidikan dasar dan perbaikan kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup dan kerjasama global. Salah satu target terpenting *MDGs* adalah memangkas jumlah orang miskin menjadi tinggal separuh jumlah yang tercatat pada 1990. Saat ini, persentase jumlah orang miskin mencapai 43 persen. Kita patut bersyukur bahwa secara global, target tersebut telah tercapai pada 2010, saat jumlah orang miskin berkurang menjadi 21 persen dari jumlah pada 1990 (Hadar, 2014). Meski demikian, jumlah tersebut masih terbilang besar. Dengan menggunakan angka US\$ 1,25 per hari sebagai batas kemiskinan, tercatat hampir 1,2 miliar warga dunia masih berlutut dalam kemiskinan, termasuk 400 juta anak yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim (Bank Dunia pada 2013). Apalagi, penyebab pengurangan kemiskinan global terutama adalah perkembangan positif di Asia, khususnya Cina. Di negara itu, selama dua dekade terakhir, ratusan juta orang mengalami peningkatan kesejahteraan.

Selanjutnya, bagaimana dengan pencapaian *MDGs* Indonesia. BPS mengukur garis kemiskinan dengan penghasilan Rp 300 ribu per orang per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp 250.000 per orang per bulan untuk penduduk desa. Pengukuran itu sama dengan US\$ 1,5- 1,6 per orang per bulan dengan patokan kurs, sementara acuan internasional menggunakan patokan tarif pasar. Berdasarkan indikator tersebut, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen dari jumlah total penduduk. Dibanding pada September 2013, telah terjadi penurunan jumlah orang miskin dari 11,46 persen menjadi 11,25 persen (Hadar, 2014). Meski demikian, pada saat yang sama, terjadi kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dari 1,75 persen menjadi 1,89 persen. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan,

yang naik dari 0,43 persen menjadi 0,48 persen (BPS, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia semakin parah karena menjauhi garis kemiskinan, sementara ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

Pembangunan manusia di Indonesia rentan guncangan. Untuk itu, pembangunan perlu memperhatikan risiko serta kerentanan di dalam masyarakat dan lingkungan agar ada ketahanan dalam menghadapi guncangan (Kompas, 8/10/2014). Isu mempertahankan kemajuan pembangunan manusia dengan memperhatikan kerentanan itu menjadi pesan terkait Indeks Pembangunan Manusia 2014 oleh Program Pembangunan PBB (*UNDP*). Kerentanan dan risiko pembangunan manusia Indonesia tak lepas dari bencana alam, konflik sosial, ketahanan pangan, dan timpangnya distribusi pendapatan.

Kondisi kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai oleh tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran, angka putus sekolah, dan kondisi rumah yang boleh dikatakan tidak layak huni. Menurut *The World Bank* kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana orang banyak mengalami hambatan untuk memperoleh kesejahteraannya. Menurut (Mukherjee, 2002), kondisi ini termasuk ketidakcukupan akan konsumsi, kerawanan terhadap risiko yang mengancam kehidupan, terbatasnya pendidikan, kurangnya pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kesehatan, infrastruktur yang gagal menyediakan kebutuhan sehari-hari air bersih dan perumahan serta rendahnya kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial politik dalam (Wuryandari, 2010). Kondisi derajat kesehatan yang rendah di Indonesia terjadi karena adanya kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia hidup dalam kondisi miskin dan hidup di lingkungan yang kualitasnya rendah, seperti tidak mempunyai

akses terhadap air bersih, berperilaku hidup kurang sehat dan kondisi rumah yang tidak layak huni. Kajian artikel ini menggunakan metode studi pustaka sebagai cara untuk melakukan analisis sehingga diperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebuah argumentasi perlu didukung dengan data dan kajian ilmiah agar bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itulah maka kajian ini menggunakan studi pustaka untuk mendukung argumentasi yang dibangun.

## PEMBAHASAN

### Problematika Pembangunan

Indonesia, menurut Bank Dunia, merupakan negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar ke-10 di dunia berdasarkan paritas daya beli. Negara Asia lainnya yang masuk kelompok 10 besar adalah Tiongkok, India dan Jepang (Kompas, 2014). Namun, ada perkembangan lain yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Tingkat kemiskinan dalam dua tahun terakhir sulit turun, sementara ketimpangan kesejahteraan melebar. Secara rata-rata kemakmuran meningkat 4,87 persen, tetapi distribusinya tak merata. Pada kelompok 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kesejahteraan hanya sekitar 2 persen. Adapun pada 20 persen kelompok berpenghasilan tinggi, kenaikan kesejahteraan di atas 8 persen (Kompas, 2014). Artinya, kelompok miskin menerima lebih sedikit manfaat pembangunan dibandingkan dengan kelompok tidak miskin.

Ada dua permasalahan pembangunan utama yang pada saat ini dihadapi oleh negara-negara berkembang. Kedua masalah itu adalah kemiskinan yang diderita oleh sebagian besar rakyat negara-negara itu, dan beban hutang luar negeri yang harus mereka tanggung. Untuk mengatasi masalah ini biasanya para perencana pembangunan di negara-negara

tersebut menyusun suatu model pembangunan yang disusun atas dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa kemiskinan dan hutang luar negeri itu bisa diatasi dengan cara *capital transfer* dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Asumsi kedua adalah bahwa kedua masalah itu dapat dipecahkan apabila pemerintah menjadi pengelola tunggal dana-dana pembangunan itu (Soetrisno, 1988).

Dua asumsi teoritik yang menjadi dasar dari model pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang dapat dikatakan gagal dalam memecahkan dua masalah pokok dalam pembangunan negara-negara itu, yakni kemiskinan dan hutang luar negeri yang membengkak. Salah satu sebab kegagalan itu terkait erat dengan kenyataan bahwa model pembangunan yang dikembangkan atas dasar asumsi itu meletakkan negara dan aparatnya sebagai penanggung jawab tunggal pembangunan dan pengelola tunggal dana serta sumber daya pembangunan yang ada di negara-negara itu (Soetrisno, 1988). Keadaan seperti ini menimbulkan suatu masalah pembangunan baru di negara-negara sedang berkembang, yakni gejala enggannya masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Apabila kita kaji rencana pembangunan yang ditulis para perencana pembangunan di negara yang sedang berkembang maka satu kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa semua perencana pembangunan itu melihat bahwa industrialisasi adalah dewa penyelamat dari masalah pembangunan yang dihadapi negara-negara itu. Menjadi negara industri dalam artian membangun industri-industri berat seperti halnya yang dibangun negara-negara barat dianggap sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan yang mereka rencanakan. Sekali lagi suatu ironi yang terjadi dalam sejarah pembangunan di negara sedang berkembang yaitu bahwa ternyata industri yang

bermunculan di negara-negara tersebut tidak berhasil memecahkan masalah pembangunan yang mereka hadapi.

Dalam perspektif ekonomi politik, ketimpangan pembangunan antarsektor ekonomi akibat kegagalan strategi pembangunan. Dukungan kebijakan terhadap pembangunan sektor industri tanpa menyertakan sektor pertanian di masa lampau telah menciptakan banyak kantong-kantong orang miskin (Yustika, 2009). Sayangnya, pengembangan sektor industri secara besar-besaran yang digerakkan oleh pemerintah justru mengalami kegagalan, padahal kebijakan khusus telah diberikan, misalnya subsidi, tata niaga, lisensi dan monopoli. Sebaliknya, akibat kebijakan khusus tersebut, sektor industri yang dikembangkan struktur pasarnya menjadi sangat terkonsentrasi.

Indonesia sebagai negara berkembang, sudah merdeka secara politik 69 tahun yang lalu, namun dengan tingkat kemajuan ekonomi yang relatif masih terbelakang. Dengan kondisi geografi, demografi, dan sumber daya alam yang berada di negara dengan ribuan pulau serta dengan kondisi sosial yang majemuk, maka negeri ini sangat membutuhkan landasan ideologi yang notabene termaktub dalam Pembukaan UUD 45 berupa Pancasila (Damanhuri, 2014). Hingga saat ini model pembangunan Indonesia belumlah memasukkan nilai-nilai Pancasila yang dengan peran ilmu pengetahuan, teknologi dan energi sosial keagamaan dalam kerangka perumusan model pembangunan yang berbasis spiritualitas, pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan dan keadilan sosial. Lebih jauh lagi, nilai-nilai Pancasila belum dijadikan pertimbangan yang sistematis dalam merumuskan kebijakan, strategi dan dalam merealisasikan program-program pembangunan. Akan tetapi, seperti yang berjalan selama ini, masih bersifat

pragmatis karena baru mengadopsi model pembangunan berbasis *textbook* dengan spirit teori ekonomi neo-klasik/neo liberal yang lebih, teks bermuatan ekonomi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kita membutuhkan transformasi Pancasila dari "pendekatan ideologis-doktriner" menjadi "ideologi terbuka" yang dijadikan rujukan wajib dalam perumusan produk perundang-undangan dan peraturan di bawahnya dalam merekayasa sosial kemasyarakatan dengan proses pembangunan. Di alam demokrasi ini sangat mutlak pendekatan ideologis-terbuka dengan sumbangan Iptek melalui peranti menginterpretasikan dan analisis (*tool of interpretation and analysis*) terutama untuk mentransformasikan Pancasila dalam merekayasa sosial kemasyarakatan dengan proses pembangunan. Di barat memang pendekatan terbuka ideologi mereka hanya disumbang oleh Iptek karena dasarnya sekularisme (Damanhuri, 2014). Oleh karena itu, model pembangunan Indonesia pun dengan berbasis ideologi terbuka dengan sumbangan agama publik dan Iptek diyakini akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Sementara itu, hingga sekarang seperti telah diuraikan, Indonesia dalam proses pembangunannya lebih didasarkan pada pendekatan pragmatis dan *ad hoc* serta mengadopsi model pembangunan neoliberalisme-kapitalis yang terbukti lebih banyak menghasilkan ketahanan nasional yang rapuh.

Terkait dengan utang luar negeri, Rachbini (2001) mengungkapkan kebijakan utang luar negeri merupakan warisan sejarah kebijakan ekonomi Indonesia yang terbukti menjadi titik kelemahan paling krusial selama ini. Warisan utang ini sangat menyedihkan karena jumlahnya besar dan dampaknya yang kritis terhadap kehidupan ekonomi nasional, anggaran dan

masa depan ekonomi Indonesia sendiri. Oleh karena itu, utang luar negeri bagi Indonesia adalah kecelakaan sejarah, yang menyebabkan ekonomi nasional rapuh dan terpuruk setelah timbul gejolak ekonomi eksternal karena globalisasi. Kesalahan kebijakan ini berasal dari kesalahan konseptual teoritis dalam memandang makna, fungsi, dan substansi dari utang luar negeri. Kesalahan dalam cara pandang ini kemudian bergulir menjadi kesalahan institusional yang berdimensi ekonomi politik. Kegagalan kebijakan ini terjadi karena kegagalan dalam membangun institusi yang mendukung proses kebijakan utang luar negeri.

Ketimpangan pendapatan yang mengalami penurunan drastis pada pertengahan abad ke-20 justru melonjak baru-baru ini. Akibatnya, kesenjangan antar si kaya dan si miskin secara global saat ini berada pada tingkat yang sama sebelum revolusi industri terjadi pada 1820. Peneliti dari *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam laporan utama tentang perkembangan kesejahteraan global memperingatkan, kondisi ini ialah salah satu perkembangan yang paling mengkhawatirkan selama 200 tahun terakhir (Media Indonesia, 2014). Studi mencatat ketimpangan pendapatan sempat menurun tajam pada akhir abad ke-19 hingga 1970. Namun, kontribusi dari globalisasi yang terjadi sejak 1980-an menyebabkan ketimpangan pendapatan di 25 negara semakin melebar. Peningkatan ketimpangan pendapatan itu mengakibatkan gap tingkat pendapatan antara negara satu dan yang lain melebar.

Adapun untuk Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Sri Adiningsih (Media Indonesia, 2014), bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia semakin parah dan meningkat dalam satu dekade terakhir, terutama antar Jawa dan luar Jawa.

Bila tidak segera ditanggulangi, ketimpangan tersebut akan menimbulkan gejolak sosial. Tren memburuknya ketimpangan kesejahteraan ekonomi memang terjadi di tingkat global. Keadaan di Indonesia cenderung lebih mengkhawatirkan. Sudah semakin parah, baik antara Jawa dan luar Jawa maupun antar perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan yang semakin tajam terlihat dari koefisien gini Indonesia yang kini berada pada posisi 0,41. Rasio itu cenderung terus meningkat ketimbang pada periode 2000-an yang berada pada level 0,3. Koefisien gini mengukur kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara. Semakin tinggi nilai koefisien gini, ketimpangan pendapatan semakin lebar.

Informasi lain menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan menjadi tantangan terbesar. Tingkat penurunan kemiskinan terus melambat, yakni hanya 0,7 persen pada 2012-2013 atau terendah dalam 10 tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan ketimpangan yang makin cepat (Kompas, 2014). Radrigo A Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, menilai, Indonesia telah berkembang pesat hingga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bergabung dalam kelompok 20 negara dengan produk domestik bruto terbesar di dunia.

Akan tetapi menurut laporan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Penurunan sejak dua tahun lalu (2012-2013) hanya 0,7 persen. Sementara penurunan tingkat kemiskinan kurun 1999-2012 dari 24 persen menjadi sekitar 12 persen atau dari perhitungan Kompas setidaknya penurunan pada masa itu lebih dari 0,9 persen per tahun. Dampak dari rendahnya penurunan kemiskinan itu, 68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh miskin dengan pendapatan hanya

sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin.

Guncangan ekonomi, seperti jatuh sakit, bencana, dan kehilangan pekerjaan, berpotensi membuat kelompok penduduk tersebut kembali jatuh miskin. Peningkatan ketimpangan juga membuat mereka yang miskin lebih sulit lagi keluar dari kemiskinan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan ketimpangan tercepat di kawasan Asia Timur. Koefisien gini, yang mengukur ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0.30 pada 2000 menjadi sekitar 0,41 pada 2013. Indonesia timur tertinggal dari wilayah lain di negara ini, terutama Pulau Jawa (Kompas, 2014).

Pergeseran peta kekuasaan di Indonesia dewasa ini memperlihatkan suatu tanda penting dalam hubungan negara dan masyarakat. Jika pada masa-masa sebelumnya negara telah menjadi suatu pusat yang sangat dominan yang tidak memberikan ruang cukup bagi partisipasi politik publik, maka pada masa sekarang ini negara tampak lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat dan terhadap eksistensi kultural dan struktural penduduk lokal. Mengingat sifat negara yang begitu berkuasa pada masa Orde Baru dan bahkan, dalam arti tertentu, sudah dimulai sebelumnya, maka realitas sosial yang ada sekarang ini telah lebih merupakan suatu realitas yang sarat dengan muatan politis yang dengan sengaja atau tidak sengaja dibangun untuk formasi negara dan pelestarian kekuasaan pemerintah (Abdullah & Saleh, 2001).

Dalam era persaingan global, di mana batas antar negara menjadi kabur, tiap-tiap negara berupaya membangun dan memperkuat *Positioning* industri dalam negeri. Indonesia sebagai negara yang disebut akan menjadi kekuatan ekonomi global dan dikelompokkan ke dalam BRIIC (Brasil, Rusia, India, Indonesia, Cina) perlu mempersiapkan diri. *Positioning*

keunggulan bersaing (*competitive advantage*) biasanya dibangun secara bertahap dan berbasis sumber daya yang dimiliki. Indonesia perlu dengan segera mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat menjadi sumber keunggulan bersaing (Firmanzah, 2010).

Desain pembangunan nasional selama ini terkesan masih bertumpu pada optimalisasi sumber daya di darat. Kebijakan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan terus dioptimalkan dalam beberapa dekade. Padahal Indonesia memiliki potensi laut berlimpah. Optimalisasi semua potensi yang terdapat di dalamnya dapat dijadikan sumber keunggulan bersaing Indonesia di masa depan. Perlu ada upaya serius dari semua pihak untuk membangun industri nasional berbasis potensi kelautan/pesisir yang terintegrasi dari sektor hulu-hilir.

Ada dua aliran teori besar berkembang membangun ekonomi menyejahterakan masyarakat. Pertama adalah aliran konservatif yang mendambakan kebebasan pasar dari intervensi pemerintah. Aliran konservatif ini percaya semangat "*homo-economicus*" selaku "makhluk ekonomi" bisa mengembangkan kemampuan diri asalkan diberi kebebasan berkarya dan mencipta (Salim, 2012). Landasan ilmu aliran ini dikembangkan oleh "*Chicago School*" Amerika Serikat dengan pemikiran utamanya Profesor Millton Friedman. Dalam pola pembangunan ini kemiskinan akan terhalau oleh daya kreatif masyarakat yang tumbuh dalam kebebasan ekonomi mengikuti nalurinya selaku "makhluk ekonomi".

Aliran kedua mengembangkan teori intervensi pemerintah dalam pasar menggiring pembangunan ekonomi ke sasaran tertentu, seperti kesempatan kerja penuh, "*counter-cycilus*", *counter-inflasi*. Landasan teorinya diletakkan oleh John Meynard Keynes dari

Universitas Cambridge, Inggris. Perinsipnya bahwa "pasar" tidak bisa dibiarkan mandiri, tapi perlu peranan pemerintah untuk memberantas kemiskinan dengan intervensi dalam ekonomi. Maka, pemerintahlah harus aktif "mengangkat sang miskin" keluar dari lubang kemiskinan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang "pro-poor" (Salim, 2012). Penganut paham ini, seperti Prof. Joseph Eugene Stiglitz, Jeffrey Sachs, dan di Tanah Air kita Prof. Sumitro Djohadikusumo, dan Widjojo Nitisastro, telah memperluas teori ini ke dalam langkah kebijakan pembangunan.

Menurut Firmanzah (2012) skenario empat klaster sasaran program pengentasan kemiskinan sudah menunjukkan kecenderungan keberhasilan, khususnya dalam menekan jumlah penduduk miskin melalui *keep buying Strategy*. Strategi ini sekaligus juga mencegah "jatuhnya" kelompok masyarakat menjadi "miskin" akibat *external-shock* dari dampak krisis di zona Eropa dan resesi global.

Klaster satu, bantuan dan perlindungan sosial. Pada kelompok ini pemerintah memberikan bantuan kepada rumah tangga sasaran (RTS) untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Program ini meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan bantuan sosial lainnya. Beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin (Raskin) masing - masing 15 kg per RTS per bulan dengan harga Rp 1.600 per kg. untuk 3,15 juta ton Raskin bagi 17,49 juta RTS. Program PKH diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Setiap RTSM mendapat antara Rp 600 ribu dan Rp 2,2 juta pertahun. Total anggaran disiapkan Rp 15,3 triliun Anggaran PKH 2012 sebesar 1,8 triliun untuk 1,5 juta RTSM di 33 provinsi, 168 kabupaten/kota, dan 1,787 kecamatan.

Klaster dua, pemberdayaan masyarakat. Klaster dua ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Program pada klaster ini dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di lima kementerian. Anggaran PNPM 2012 mencapai Rp 14,053 triliun. Klaster tiga, kredit usaha rakyat (KUR). Program pada kelompok ini dilaksanakan dengan tujuan membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kapasitas serta memperluas usahanya. Melalui program ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat KUR. KUR tahun 2010 telah dikucurkan Rp 17,23 triliun dan tahun 2011 Rp 29 triliun. Tahun 2012 KUR ditargetkan Rp 30 triliun sehingga dapat memperbesar aksesibilitas finansial usaha makro dan kecil yang *non-bankable*.

Mekanisme KUR yang diluncurkan sejak tahun 2007 ini telah berhasil meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah dan menekan angka kemiskinan. Klaster empat, program prorakyat. Program pada klaster ini dimaksudkan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui ketiga klaster lainnya. Program ini, antara lain, program rumah sangat murah dan murah tahun 2012 sebanyak 6.162 unit dengan anggaran Rp 514,58 miliar, program kendaraan umum angkutan murah dengan anggaran APBN 2012 Rp 50 miliar, program listrik murah dan hemat dengan anggaran Rp 228 miliar, program peningkatan kehidupan nelayan Rp 1,2 triliun (Firmanzah, 2012).

### **Orientasi Pembangunan Kesejahteraan**

Dalam dua dekade terakhir, masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia, mengalami fase perkembangan penting dalam mewujudkan kesejahteraannya. Berbagai studi Barrientos, Gough, dan Wood (2004),



sebagaimana dikutip (Sumarto, 2014) menunjukkan, negara berkembang sedang menghadapi tantangan transformasi rezim kesejahteraan. Melalui transformasi yang terjadi karena peningkatan peranan negara dalam distribusi perlindungan sosial itu, hak masyarakat mendapatkan kesejahteraan bisa tercapai dengan lebih mudah. Di negara kesejahteraan (*welfare state*) di Eropa dan Amerika, transformasi serupa telah dialami lebih dari 400 tahun lalu melalui pengesahan *Elizabethan Poor Law* yang memberi mandat kepada negara untuk memberikan perlindungan sosial rumah tangga miskin.

Gough (2004), Konsep rezim kesejahteraan berkembang setelah publikasi buku monumental karya Esping-Anderson pada 1990. Rezim kesejahteraan merupakan rangkaian pengaturan kelembagaan, kebijakan, dan tradisi yang mempengaruhi kesejahteraan dan struktur sosial di masyarakat (Sumarto, 2014).

Menurut Hardiman & Midgley (1982) Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dipahami melalui pendekatan teoritis-konseptual maupun yuridis-kontekstual. Secara konseptual, pembangunan kesejahteraan sosial berakar pada pembangunan sosial dan berpusatkan pada rakyat. Dalam konteks Pembangunan Nasional, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kesejahteraan rakyat selaras dengan konsepsi pembangunan sosial, yang dalam literature mencakup pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan (Baharsyah, 1999). Oleh karena itu, di Indonesia pembangunan kesejahteraan sosial memiliki akar baik secara teoritis-konseptual, yaitu pembangunan sosial berpusatkan pada rakyat, maupun yuridis-kontekstual yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat.

Sepintas telah disinggung bahwa sejak tahun 1980-an, setelah banyak negara berkembang mengalami distorsi pembangunan, maka pembangunan sosial mulai mendapat prioritas. Padahal sebelum itu, pemecahan sosial umumnya dilakukan melalui mekanisme pasar sebagaimana ciri negara-negara kapitalis. Pada hakekatnya tidak pernah ditemukan konsep pembangunan kesejahteraan sosial karena secara internasional ia bukanlah sektor atau subsektor dari pembangunan nasional. Kesejahteraan sosial adalah tujuan dan kondisi sebagai "buah" pembangunan. Tidak heran, jika kemudian kesejahteraan sosial menjadi ukuran kemajuan suatu bangsa (Baharsyah, 1999). Di Indonesia, istilah pembangunan kesejahteraan sosial lahir sebagai dampak dari kebijakan penempatan kesejahteraan sosial sebagai sebuah subsektor dari sektor kesejahteraan rakyat. Sebagai subsektor, pembangunan kesejahteraan sosial lebih berperan menangani masalah-masalah marjinal dan residual.

Marciano Vidal sebagaimana dikutip Purnomo (2011) mengungkapkan, karakteristik negara kesejahteraan ditandai oleh empat hal pokok. Pertama, komitmen Negara dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan untuk mengakomodasi melimpahnya angkatan kerja aktif-produktif. Kedua, adanya jaminan asuransi sosial yang berlaku bagi semua warga Negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan, terutama kesehatan dan bila terjadi kecelakaan. Ketiga, terselenggaranya pendidikan murah bermutu bagi rakyat, termasuk jaminan beasiswa bagi mereka yang berprestasi, tetapi berasal dari kalangan ekonomi lemah. Keempat, kebijakan sosial sebagai upaya redistribusi kekayaan. Untuk yang terakhir ini, upaya itu sungguh-sungguh cerminan wajah solidaritas baru dari yang kuat kepada yang lemah, bukan sekadar obat untuk menyembuhkan kesenjangan sosial.

Mewujudkan karakteristik negara kesejahteraan adalah tugas para pemimpin bangsa. Mereka bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup warganya sehingga terciptalah tatanan hidup bersama yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Negara dan penyelenggara negara bertanggung jawab menyelenggarakan semua pelayanan publik sehingga standar kesejahteraan masyarakat terjamin, terpenuhi, tanpa mengecualikan seorang pun. Kegagalan para pemimpin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat merupakan kegagalan mereka dalam menyelenggarakan amanahnya.

Selama ini ada kecenderungan yang terjadi, bukannya masyarakat mencontoh para pemimpinnya dalam hal saling melindungi antar warga, melainkan justru rakyatlah yang memberikan contoh kepada para pemimpin dalam mengembangkan antusiasme solidaritas kewarganegaraan. Aparatur negara selalu terlambat mewujudkan solidaritas dibandingkan masyarakat warga merespon berbagai persoalan di tingkat akar rumput. Adalah kewajiban dan tanggung jawab negara, aparatur negara dan para pemimpinnya, untuk mewujudkan keempat karakteristik negara kesejahteraan tersebut.

Gilbert (2006) menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tema penting telah mewarnai kajian-kajian mengenai kebijakan kesejahteraan sosial. Tema-tema tersebut mencakup kewajiban warga negara atas penerima bantuan kesejahteraan, meningkatnya peran sektor swasta dalam sistem ekonomi kesejahteraan campuran (*mixed economy of welfare*), peningkatan penggunaan pajak dan mekanisme kredit untuk membiayai santunan kesejahteraan dan sejumlah perkembangan di mana mekanisme alternatif untuk menyediakan santunan kesejahteraan yang justru menguntungkan kalangan kelas menengah.

Mengaitkan demokrasi dengan kesejahteraan tidak pernah putus dari beragam perdebatan. Persoalannya, apakah demokrasi menjadi faktor pemicu kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya justru kesejahteraanlah yang memungkinkan demokrasi berjalan dengan baik? Di luar pertanyaan itu sebenarnya terdapat pula beragam pertanyaan hipotetis lain yang tidak kurang menjadi perhatian. Misalnya, apakah benar demokrasi menjadi satu-satunya prasyarat bakal terciptanya kesejahteraan, atau sebaliknya kesejahteraan menjadi syarat penentu? Apabila memang kedua entitas tersebut berkaitan, apakah selinier itu hubungan yang terbentuk? Masih banyak lagi yang dapat diperdebatkan dari keduanya. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan "mana yang lebih dahulu" di antara variabel demokrasi dan kesejahteraan belakangan ini menjadi semakin krusial dipersoalkan, terutama bagi negara-negara yang pada satu sisi kini berubah struktur politiknya, sementara di sisi lain negara tersebut tengah pula bergulat dalam pemakmuran masyarakatnya (Nainggolan, 2011).

Mengutip gagasan Kevin Olson (2006) dalam karyanya, *Reflexive democracy: Political Equality and The Welfare State*, pemikiran politik kontemporer mengalami krisis ketika dimensi kesejahteraan absen dalam pembicaraan demokrasi. Ia menguraikan, untuk mengintegrasikan kesejahteraan dalam pembicaraan demokrasi maka pertama-tama penting kiranya menggeser cara pandang kita tentang kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat bukanlah istilah yang secara sempit dimaknai dalam konteks sosial-ekonomi, melainkan lebih luas lagi di dalam dimensi politiknya pula.

Bagi Indonesia, pertanyaan semacam tersebut di atas menjadi semakin relevan, terutama tatkala kedua persoalan itu dihadapkan pada realitas yang berkembang di masyarakat saat ini. Mencermati berbagai hasil

pengumpulan opini publik yang dilakukan sepanjang tahun ini, misalnya, terlihat benar adanya kecenderungan ketidakpuasan publik yang cukup terhadap berbagai kondisi politik, sosial, ataupun ekonomi yang mereka rasakan. Sebagian besar di antara mereka berpandangan bahwa reformasi politik yang 12 tahun terakhir mampu melembagakan demokrasi di negeri ini sayangnya dianggap belum juga mampu menjawab harapan mereka. Kinerja sejumlah institusi politik demokratik, baik partai politik, DPR, maupun pemerintahan, yang hadir selama kurun waktu tersebut, dinilai tidak memuaskan. Semakin mengecewakan tatkala kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari perubahan struktur politik tidak juga banyak dirasakan sebagaimana yang mereka harapkan (Nainggolan, 2011).

Pembangunan kesejahteraan sosial mendatang ini sebaiknya memperhitungkan perkembangan bergulirnya proses globalisasi yang ditandai dengan demokratisasi politik, liberalisasi pasar, dan universalisasi kultural (Sumarno, 1999). Demokratisasi politis menghendaki pembangunan kesejahteraan sosial oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kebutuhan agar terwujud masyarakat yang mandiri, mengerti hak dan kewajibannya secara tepat dan mampu berperan aktif dalam pergaulan nasional dan internasional. Liberalisasi pasar menuntut terjadinya ketahanan ekonomi rakyat sehingga tidak tergusur oleh gelombang pasang-pasangnya pasar bebas. Ekonomi kerakyatan tidak hanya sebagai slogan, akan tetapi perlu diaktualisasikan untuk memberdayakan kemampuan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Sementara itu universalisasi kultural menantang kita untuk tidak kehilangan identitas atau jati diri dan kebangsaan sebagai suatu bangsa, setiap bantuan yang berdampak ketergantungan dan apalagi hubungan yang

opresif harus dihindari oleh karena bantuan yang demikian cenderung melunturkan martabat dan harkat masyarakat.

### **Peranan Sumber Daya Manusia**

Meminjam perspektif Soedjatmoko, humanis dan intelektual bebas pada zamannya, sebagaimana dikutip Saharsad (2012), bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan modal paling penting dari suatu bangsa, lebih dari pemilikan sumber daya alam. Nasionalisme baru berbasis kualitas itu yang membuat manusia Indonesia bisa bermartabat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa lain.

Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan modern, kecakapan ilmu dan teknologi merupakan proses belajar yang harus dilakukan seumur hidup bila bangsa kita hendak survive dalam globalisme yang mencekam dan memangsa bangsa-bangsa yang lemah atau rentan karena kurangnya pendidikan. Bagi Indonesia nasionalisme baru yang berbasis pada ilmu-teknologi, moralitas dan kemanusiaan, merupakan pembentuk identitas kebangsaan yang kokoh dan kenyal.

Nasionalisme baru lebih menekankan tindakan nyata, peduli dan jujur untuk kepentingan nasional dan bangsanya, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Di era globalisasi ini, banyak pihak cemas dan khawatir bahwa para elite bisnis di Indonesia, menjadikan nasionalisme baru sebagai alat untuk mencapai kepentingan sempit dan tujuan tertentu, misalnya para pengusaha berinvestasi di luar negeri hanya karena meminimalkan resiko jika terjadi huru-hara di Jakarta dan kota lainnya. Apalagi selama ini, perspektif "nasionalisme resmi" (*official nationalism*) lebih dominan karena menjadi wacana elite penguasa, pengusaha dan pejabat Negara (Saharsad, 2012).

Oleh karena itu, nasionalisme baru harus ditafsirkan sebagai sebuah kekuatan inklusif dan membebaskan. Meminjam bahasa Anthony Smith, segala bentuk, bentuk lokalitas wilayah, dialek, adat istiadat dan klan terpinggirkan. Atas nama nasionalisme, terbentuklah sebuah negara bangsa yang besar, yang mampu memusatkan pasar, sistem administrasi, perpajakan, dan pendidikan. Semangatnya adalah kerakyatan dan demokratis. Melalui nasionalisme, segala bentuk sistem nilai yang feodalistik dan kekuatan penjajah yang opresif berpeluang untuk dijungkalkan. Nasionalisme baru itu, pada gilirannya menjadi modal bagi lahirnya kedaulatan rakyat serta penentuan nasib mereka secara independen. Nasionalisme baru merupakan kontinuitas ("*some improvement*") atas nasionalisme lama di abad ke-19 dan 20-an yang dimanifestasikan dalam gerakan elite pribumi melawan penguasa kolonial serta berbagai sistem administrasi yang mendukungnya.

Bagaimanapun, meminjam perspektif Anthony D. Smith sebagaimana dikutip Sahrasad (2012), teori nasionalisme mengalami perkembangan dari masa ke masa dan tergantung pendekatan apa yang digunakan. Pandangan yang mengatakan bahwa bangsa adalah sebuah entitas yang konkrit, yang didasarkan pada latar sejarah dan kehidupan sosial, masyarakatnya homogen dan bersatu, serta mencerminkan aktor sosial dan politik utama dalam dunia modern, dalam tiga puluh tahun terakhir ini, nampaknya tidak lagi dapat dipertahankan. Pikiran baru mengenai nasionalisme semacam itu mengindikasikan bahwa monopoli interpretasi dan sentralisasi pengertian tentang nasionalisme harus digantikan oleh demokratisasi pemahaman secara lebih substansial. Di sini nasionalisme baru memiliki relevansinya dengan dinamika situasi.

Dengan demikian, maka konsep pembangunan harus didasarkan ontologi analisis ekonomi-politik yang multi disiplin. Dewasa ini para teknokrat kabinet Reformasi yang terjebak pada ontologi ekonomi Neo-Klasik yang tunggal dimensi, yaitu dari aspek tekno-ekonomi semata. Oleh karena itu, kaum teknokrat tidak mampu melihat persoalan ekonomi yang sebenarnya. Mereka tidak mampu melihat bahwa hingga kini, perekonomian Indonesia masih berada dalam sindrom tiga ketergantungan, modal, teknologi dan perdagangan (Rahardjo, 2014).

Sosiolog Naim (2011) mengabarkan bahwa yang ditonjolkan selama ini hanyalah "apa dan bagaimana serta dengan hasil capaian berapa, secara makro, lalu dibagi dengan jumlah penduduk", tetapi tak pernah "oleh siapa dan untuk siapa, menurut jalur pelapisan sosial". Padahal struktur masyarakat kita sangat berlapis dan bertingkat, bahkan cenderung dualistik dan dikotomi. Celakanya, pelapisan dan dualisme ataupun dikotomi sosial itu, seperti pada zaman kolonial dulu, cenderung etnosentrik dan etno-bias pula sifatnya. Artinya, kelompok terkecil masyarakat menurut jalur etnik itu, yang umumnya adalah nonpribumi, menguasai bagian terbesar kekayaan nasional.

Sementara kelompok terbesar dari masyarakat pribumi yang merupakan pewaris sah dari republik ini mendapatkan bagian dan porsi terkecil. Akibatnya, cita-cita Pasal 34 UUD 1945, "pembangunan itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", hanyalah isapan jempol belaka. Cobalah lihat atau cermati, siapa yang menggarap dan menguasai bumi, air, lautan dan langit Indonesia selama ini? Pemilik dan pewaris sah yang 95 persen penduduk asli pribumi atau 5 persen nonpribumi dan kapitalis multinasional lainnya? Jawaban yang jujur dan apa adanya itulah yang menjelaskan kepada kita

bagaimana dan betapa keadaan sesungguhnya dari negara dan masyarakat kita saat ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan tentang konsep pembangunan yang menyejahterakan masyarakat ini, ada kesan bahwa konsep pembangunan yang dikemukakan oleh Seers mempunyai hubungan yang relatif signifikan dengan apa yang dikonsepsikan oleh Marciano Vidal perihal karakteristik negara kesejahteraan. Seers mengungkap bahwa gagasan-gagasan tentang pembangunan makin mengakomodasi pentingnya martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat luas sebagai tujuan pokok pembangunan.

Pembangunan belum bisa dikatakan berhasil bila salah satu atau dua dari tiga kondisi, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan menjadi lebih buruk meskipun pendapatan perkapita melambung tinggi. Demikian juga apa yang diutarakan Marciano, mengenai karakteristik negara kesejahteraan. Ia mengungkapkan bahwa secara konseptual negara itu dikatakan sejahtera bila memenuhi empat kriteria pokok, yaitu komitmen negara dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan untuk mengakomodasi melimpahnya angkatan kerja, adanya jaminan asuransi sosial yang berlaku bagi semua warga negara, terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan kebijakan sosial sebagai upaya redistribusi kekayaan.

Selain adanya hubungan dua konsep yang tersebut di atas, penulis mendukung model pembangunan yang menyejahterakan di Indonesia, seperti yang dikemukakan Damanhuri bahwa yang menjadi persoalan justru karena pendekatan statis dan pragmatis yang tidak berupaya mengaitkan dengan kandungan nilai-nilai ideologis Pancasila, sehingga pembangunan tidak

beridentitas. Identitas Indonesia dalam model pembangunannya seyogianya berbasiskan ideologi negara (UUD 1945 dan Pancasila), namun dengan pendekatan dinamis (historis-empiris), yakni bagaimana proses pembangunan mampu mereaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang menjadi modal sosial. Hal itu baik berdasarkan nilai perilaku perorangan maupun kolektif (agama, tradisi serta kelembagaan) yang justru telah terbukti misalnya dalam distribusi aset produktif, pendapatan dan sosial yang adil di masa lalu dan bahkan hingga sekarang.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan dan Saleh, A.A. (2001). *Pentingnya Jaminan Sosial dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, dalam Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, (Franz von Benda-Beckmann, dkk), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baharsyah, S Justika. (1999). *Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial Pelajaran Dari Krisis*, Jakarta: Departemen Sosial.
- Chaniago, A Andrinof. (2012). *Gagalnya Pembangunan Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Damanhuri, S Didin. (2014). *Ekonomi-Politik Indonesia dan Antarbangsa dari Perlunya Membongkar GDP-Oriented, Kasus Century, Ekonomi Kerakyatan ASEAN hingga Demokrasi Timur Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Firmanzah. (2010, Februari 19). Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan. *Seputar Indonesia*.

- ..... (2012, Desember 31). Mengatasi Kemiskinan. *Republika*.
- Hadar, Ivan. (2014). *Capaian MDGs*, dalam Tempo 2/10/2014
- Gilbert, Neil. (2006). *Aset untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, Michael Sherraden. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kompas. (2014, Oktober 8). Pembangunan Manusia Indonesia Rentan. *Kompas*.
- Kompas. (2014, Oktober 10). Masalah Bangsa Sangat Besar. *Kompas*.
- Kompas. (2014, September 14) Ketimpangan Makin Cepat. *Kompas*.
- Kompas. (2014, Oktober 11). Banyak Kepentingan, Indonesia Bisa Gagal. *Kompas*.
- Kompas. (2014, Juni 13). Kemakmuran Naik, Kesenjangan Menajam. *Kompas*.
- Media Indonesia. (2014, Oktober 4). Ketimpangan Global Mundur Dua Abad. *Media Indonesia*.
- Media Indonesia. (2014, Oktober 6) Ketimpangan Pendapatan Akan Pancing Gejolak. *Media Indonesia*.
- Naim, Mochtar. (2011, Juli 23). Kita Belum Merdeka. *Harian Kompas*.
- Nainggolan, Bestian. (2011, Desember 19). Jajak Pendapat "Kompas" Demokrasi dan Kesejahteraan. *Kompas*.
- Nugroho, Yanuar. (2014, Oktober 6). Merencanakan Pembangunan. *Kompas*.
- Purnomo, B. A. (2011, November 7). Solidarisme dan Kesejahteraan Sosial. *Kompas*.
- Rachbini, J. D. (2001). *Ekonomi Politik Utang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Dawam. (2014). *Ekonomi-Politik Indonesia dan antar Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Emil. (2012). *Berdayakan "Wong Cilik Marhaen"*, dalam Pengantar Buku *An Indonesian Renaissance Kebangkitan Kembali Republik Perspektif H.S. Dillon*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sahasrad, Herdi. (2012). Diaspora Alumni IPTN di Amerika: Nasionalisme Melawan Kekalahan? *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban ULUMUL QUR'AN*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat Kerjasama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, 01/XXI/2012.
- Soetrisno, Loekman. (1988). Pembangunan ekonomi dan Demokratisasi Ekonomi: Satu Perspektif Sosiologis. *Prisma* No. 6, 1988. Jakarta: LP3ES.
- Stigliz, Joseph. (2014 Oktober, 13). Sinyal Kuat Atasi Kesenjangan. *Media Indonesia*.
- Sumarno. (1999). *Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Makalah Seminar*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Sumarto, Mulyadi. (2014 September 18). Rezim Kesejahteraan. *Kompas*.
- Wuryandari, Ani. (2010), *Partisipasi Masyarakat untuk Mengembangkan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Sido Makmur Kecamatan Wai Panji Kabupaten Lampung Selatan*, Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Ilmu Kesejahteraan, Jakarta.
- Yustika, E. A. (2009). *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.